

**PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI MIMIKA**

**NOMOR 2 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME**

**BUPATI MIMIKA**

Lampiran : 5 (lima)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang  Mengingat | :  : 1.  2. | bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, perlu membentuk Peraturan Bupati Mimika tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame.  Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).  Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 4). |

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Mimika.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.
4. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.

**BAB II**

**KETENTUAN PELAKSANAAN**

**Pasal 2**

Perhitungan nilai sewa reklame (NSR), ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk jenis Reklame Papan, Shop Sign, Branding, Billboard, Megatron, Trivision, Baliho, dan Kain.

|  |
| --- |
| NSR = NSL x UMR x JW x HSR |

1. Nilai Strategis (NS) ditentukan oleh faktor-faktor antara lain:
2. Kelas Jalan;
3. Nilai Guna Lahan;
4. Sudut Pandang;

|  |
| --- |
| Nilai Strategis = Kelas Jalan + Nilai Guna Lahan + Sudut Pandang |

1. Reklame ditanah persil dengan keluasan reklame menjorok lebih dari 50% (lima puluh persen) pada tanah negara, dihitung dengan indeks lokasi status tanah negara.
2. Tabel Harga Dasar Pemasangan Reklame (HDPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Bobot dan skor masing-masing faktor adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Untuk jenis Reklame Melekat (Stiker/Poster), Selebaran, Berjalan Termasuk pada Kendaraan, Udara, Suara, dan Film/Slide.
5. Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan:
6. Jenis reklame;
7. ukuran;
8. jumlah media reklame;dan
9. jangka waktu penyelenggaraan.
10. Besarnya Nilai Sewa Reklame sebagai berikut:
11. Reklame melekat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Ukuran | Jumlah Media  Reklame | Jangka Waktu  Pemasangan | NSR |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1.  2. | Poster   1. s/d 50cm 2. 50cm s/d 100cm 3. Lebih dari 100 cm di hitung sebagai Shop Sign   Stiker   1. s/d 50cm 2. 50cm s/d 100cm 3. Lebih dari 100 cm di hitung sebagai Shop Sign | 1 Buah  1 Buah  1 Buah  1 Buah  1 Buah  1 Buah | 1 bulan / 1 lembar  1 bulan / 1 lembar  1 Tahun / M2  1 bulan / 1 lembar  1 bulan / 1 lembar  1 Tahun / M2 | 25  75  250.000  25  75  250.000 |

1. Reklame selebaran

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Jumlah Media Reklame | Jangka Waktu  Pemasangan | NSR |
| (1) | (2) | (4) | (5) |
| 1. | Lembar | 1 Hari / 1 lembar | 200 |

1. Reklame Berjalan
2. Mobil Branding

* Rp. 170.000/Bulan

1. Angkutan umum tanpa branding produk

* Rp. 600.000/Tahun

1. Reklame udara

Nilai Sewa Reklame :Rp.100.000,-perhari

1. Reklame suara :Rp.60.000,-perpenyelenggaraan perhari
2. Reklame Film/slide
3. 1) film :Rp.15.000,-/15 detik
4. 2) slide:

* Dengan suara :Rp.13.500,-sekali tayang
* Tanpa suara :Rp.9.000,-sekali tayang

1. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan reklame sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara.
2. Keamanan keberadaan reklame serta kelengkapannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyelenggara.

**Pasal 3**

1. Tata cara penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh Kepala Dinas/Pejabat ditetapkan sebagai berikut:
2. Membuat Nota Perhitungan Pajak Daerah atas dasar Kartu Data
3. Menyerahkan kembali kartu Data kepada Unit yang membidangi Pendataan setelah pembuatan Nota Perhitungan Pajak selesai
4. Menerbitkan SKPD atas dasar Nota Perhitungan Pajak Daerah
5. Bentuk dan isi SKPD adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran III Peraturan ini.

**Pasal 4**

Tata cara pembayaran ditetapkan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ke Bank yang ditunjuk atau kepada Bendahara Penerimaan Dinas;
2. Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak disetor ketempat pembayaran yang ditetapkan, Bukti pembayaran pajak disampaikan/ditembuskan ke Bendahara Penerimaan Dinas; dan
3. Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dilakukan ke Bendahara Penerimaan Dinas, dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam Bendahara Penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

**Pasal 5**

Tata cara pembayaran dengan angsuran ditetapkan sebagaiberikut:

1. Permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas melakukan penelitian atas permohonan Wajib Pajak;
3. Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak;
4. Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala Dinas tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan;dan
5. Apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketetapan Kepala Dinas.

**Pasal 6**

1. Tata cara pengisian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) oleh Wajib Pajak ditetapkan sebagaiberikut:
2. Menyerahkan formulir Pendataan ( SPTPD)
3. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan (SPTPD) yang telah diisi wajib pajak
4. Mengisi fomulir SPTPD oleh wajib Pajak dengan benar
5. Memeriksa kelengkapan dan mencatat data Pajak Daerah dalam kartu data oleh petugas
6. Bentuk dan isi SSPD adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran IV Peraturan ini.

**Pasal 7**

Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak ditetapkan sebagai berikut:

1. permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak;
3. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
4. apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala Dinas harus memberitahukan kepada Wajib Pajak melalui surat atas penolakannya; dan
5. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan kerja sejak tanggal permohonan diterima.
6. Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).

**Pasal 8**

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan sebagai berilut:

1. Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Dinas dengan sekurang- kurangnya menyebutkan:
   1. Nama dan alamat wajib pajak;
   2. Masa pajak;
   3. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
   4. Alasan yang jelas.
2. Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
3. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;atau
4. Dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
5. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
6. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
7. Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
8. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbit kannya SKPDLB.
9. Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
10. Dalam hal wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak maka pengembalian pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyedian Dana (SP2D) pengembalian pembayaran pajak.
11. SP2D pengembalian pembayaran pajak dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

**Pasal 9**

1. Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Reklame ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah dapat bekerjasama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Mimika

Pada tanggal, 28 Februari 2014

Pj. BUPATI MIMIKA

ttd

AUSILIUS YOU

Diundangakan di Timika

pada tanggal, 28 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

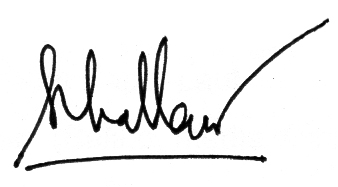
ttd

AUSILIUS YOU, S.Pd.MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19641015 199103 1 010

Salinan sesuai dengan yang asli

 KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH

PEMBINA

NIP 19640616 199403 1 008

LAMPIRAN I Peraturan Bupati Mimika

Nomor 2 Tahun 2014

Tanggal, 28 Februari 2014

TABEL HARGA DASAR PEMASANGAN REKLAME (HDPR)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | JENIS REKLAME | SATUAN | BAHAN/KOMPONEN | MASA PAJAK | | HDPP (Rp) |
| 1 | Reklame Papan |  |  |  | |  |
|  | a. Bando  b. Billboard:  1)Disinari (ditanam)  2)Disinari (ditempel)  3)Tidak disinari  (ditanam)  4)Tidak disinari  (ditempel)  Papan Merk dan Thinc. c. Plate  1)Disinari (ditanam)  2)Disinari (ditempel)  3)Tidak disinari  (ditanam)  4)Tidak disinari  (ditempel)  d. Neon Sign/Neon Box  1)Ditanam  2)Ditempel e. Baliho  f Shop Sign | M2  M2  M2  M2  M2  M2  M2  M2  M2  M2  M2  M2  M2 | Besi/logam/bahan lainnya dan lampu sinar  Besi/logam/bahan lainnya dan lampu sinar  Besi/logam/bahan lainnya dan lampu sinar  Besi/logam/bahanlainnya  Besi/logam/bahanlainnya  Kayu/plastik/seng/sejenisdanlampusinarKayu/plastik/seng/sejenis dan lampu sinar  Kayu/plastik/seng/sejenis  Kayu/plastik/seng/sejenis  Fiber/plastikkaca/sejenisnya dan komponen elektronik  Fiber/plastickaca/sejenisnya dan komponen elektronik  Kayu/triplekyangdilukis/digambar  Kayu/triplek/logam/bahanlainnya | 1 Tahun  1 Tahun  1 Tahun  1 Tahun  1 Tahun  1 Tahun  1 Tahun  1 Tahun  1 Tahun  1 Tahun  1 Tahun  1 Bulan  1 Tahun | | 600,000  500,000  450,000  400,000  350,000  450,000  400,000  450,000  350,000  500,000  450,000  25,000  250,000 |
| 2 | Megatron/Videotron dan LED | M2 | Komponen elektronik | 1 Tahun | | 1,500,000 |
| 3 | Reklame Udara (Balon Udara) | Buah | Gas dan plastik/sejenisnya | 1 Hari | | 100,000 |
| 4 | Branding | M2 | Cattembok, cat minyak dan  sejenisnya | 1 Tahun | | 150.000 |
| 5 | Reklame Kain |  |  |  | |  |
|  | a. Kain spanduk  b. Kain Rontek  c. Kain Umbul-umbul  d. Banner  e. Bendera Produk???  f. Flag Chain (Rangkai  Bendera)  g.Tenda  h. Krey | M2  M2  M2  ...  ...  ...  ...  ... | Kain  Kain  Kain  ....  ...  ...  ....  ... | 1 Hari  1 Hari  1 Hari  ...  ...  ...  ...  ... | | 350  350  350  ...  ...  ...  ...  ... |
| 6 | Reklame Merekat |  |  |  | |  |
|  | * 1. Poster   - s/d 50 cm2  - 50 cm2 s/d 100cm2  - Lebih dari 100cm2 di hitung  Sebagai Shop Sign   * 1. Stiker   - s/d 50 cm2  - 50 cm2 s/d 100cm2  - Lebih dari 100cm2 di hitung  Sebagai Shop Sign | -2- | Kertas/plastic dan sejenisnya  Kertas/plastic dan sejenisnya | 1 Bulan/  1 lembar  1 Bulan/  1 lembar | | 75  25  75  25 |
| 7 | Reklame Selebaran | Lembar | Kertas dan sejenisnya | 1 Hari/ 1 Lembar | | 200 |
| 8 | Reklame Berjalan |  |  | |  |  |
|  | - Mobil Branding  - Angkutan Umum tanpa  branding produk | Unit  Unit | Besi/logam/bahan lainnya  Besi/logam/bahan lainnya | | 1Bulan  1 Tahun | 170.000  600.000 |
| 9 | Reklame Suara | Kali | Komponen elektronik | | 1 Hari | 60.000 |
| 10 | Reklame Side/Film a. Film  b. Slide  1)Dengan Suara  2)Tanpa Suara | Kali | Komponen elektronik | | 1 Minggu |  |
|  |  |  | | 15 detik  tayangtayang | 15.000  13.500  9.000 |
| 11 | Reklame Peragaan | Kali | Alat peraga dan lainnya | | 1Hari | 427,500 |

Pj. BUPATI MIMIKA

ttd

AUSILIUS YOU

Diundangakan di Timika

pada tanggal, 28 Februari 2014

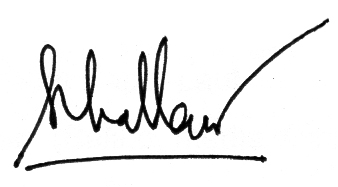
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

ttd

AUSILIUS YOU, S.Pd.MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19641015 199103 1 010

 Salinan sesuai dengan yang asli

KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH

PEMBINA

NIP 19640616 199403 1 008

-3-

LAMPIRAN II Peraturan Bupati Mimika

Nomor 2 Tahun 2014

Tanggal, 28 Februari 2014

TABEL BOBOT DAN SKOR FAKTOR-FAKTOR PENENTU NILAI STRATEGIS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Lokasi | | | No. | Nilai Guna Lahan | | No. | Sudut Pandang | |
| **Bobot 50 %** | Skor Tanah Negara | Skor Tanah Persil/ Milik  Sendiri | **Bobot 30 %** | Skor | **Bobot 20%** | Skor |
| 1 | Kelompok Jalan A | **2,5** | **2.5** | 1 | Kawasan Hijau, Perdagangan & Jasa | **2** | 1 | ≥ Tigasisi | **3** |
| 2 | Kelompok Jalan B | **2** | 2 | 2 | Kawasan Pariwisata, Pemerintahan dan Perkantoran | **1,5** | 2 | Duasisi | **2** |
| 3 | Kelompok Jalan C | **1,5** | 1,5 | 3 | Kawasan Pemukiman | **1** | 3 | Satusisi | 1 |
| 4 | Kelompok Jalan D | **1** | 1 | 4 | Kawasan Lain - Lain | **0,5** | 4 |  | **1,5** |

Pj. BUPATI MIMIKA

ttd

AUSILIUS YOU

Diundangakan di Timika

pada tanggal, 28 Februari 2014

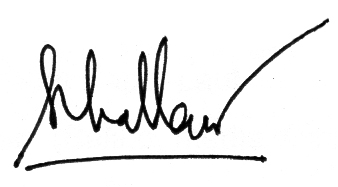
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

ttd

AUSILIUS YOU, S.Pd.MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19641015 199103 1 010

 Salinan sesuai dengan yang asli

KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH

PEMBINA

NIP 19640616 199403 1 008